

Analisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan

Ranifial Anugra¹, Taufiq Marwa² dan Imelda^{2*}

¹ Mahasiswa Jurusan Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

² Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia

* Email penulis korespondensi: imeldazainal@unsri.ac.id; Tel.: +62-812-7851-8477

Abstract: The purpose of this study is to determine the relationship between government expenditure and inequality income distribution. This research is a quantitative research. This data is secondary data which obtained from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi and Manajemen Data Dasar Regional. Granger Causality Test and Cointegration Test are used. The results of this study indicate that the form of relationship between government expenditure with income distribution inequality is one direction and not vice versa. While in the long run there is no cointegration between the variables.

Keywords: Government Expenditure; Inequality Income; Granger Causality

JEL Classification: D60, D63

1. PENDAHULUAN

Sistem perekonomian suatu daerah atau negara memainkan peran sangat penting, seperti pemerintah dalam hal ini mutlak berperan serta dalam setiap bentuk sistem perekonomian, tidak hanya untuk mengelola barang dan jasa publik tetapi juga sekaligus mengalokasikan barang-barang produksi dan barang-barang konsumsi, memperbaiki distribusi perdagangan nasional, kestabilan perekonomian, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi (Suparmoko, 2011). Teori Adam Smith mengemukakan bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi yaitu; (1) Peran Alokasi yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber dan agar lebih optimal penggunaannya. (2) Peran Distribusi yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk menyesuaikan pembagian pendapatan dan mensejahterakan masyarakat. (3) Peran Stabilisasi yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang mantap (Mangkoesebroto, 2001).

Peran-peran yang telah diuraikan perlu dijaga dan dijalankan agar sistem perekonomian terkendali, agar tidak menyebabkan eksternalitas yang dapat merugikan keseimbangan ekonomi, sehingga dapat menyebabkan ketimpangan perekonomian disuatu wilayah atau daerah. Peran pemerintah dalam ekonomi nasional salah satunya dapat dilihat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara atau daerah (APBN/APBD). Menurut Suminto (2004) anggaran pengeluaran dan belanja negara merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan sekaligus sebagai alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, maka APBN bukan saja keputusan ekonomi tetapi juga menyangkut keputusan-keputusan politik. Dalam hubungan ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN, tujuan dari pengeluaran pemerintah adalah untuk menstabilkan perekonomian sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik.

Aspek pengeluaran pemerintah termasuk salah satu aspek dari penggunaan sumberdaya ekonomi secara langsung yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat. Menurut Wagner, pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu

meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. (Mangkoesoebroto, 2001).

Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan daerah. Pembangunan ini guna menciptakan pertumbuhan ekonomi berjalan dan mengalami perubahan perputaran kearah yang lebih baik dan pada akhirnya akandapat meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus meningkat dalam jangka panjang.

Untuk mendorong perubahan ekonomi dapat berjalan sesuai rencana yang dirumuskan maka peranan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sumber-sumber pembangunan dan penggalian sumber-sumber potensi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Untuk keperluan tersebut, maka peranan Pengeluaran Pemerintah sebagai alat pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut haruslah disusun secara cermat, sehingga pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Tabel 1, dapat dilihat perubahan-perubahan dalam komponen Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1. Pengeluaran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 – 2013

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Dalam Juta Rupiah)
2010	3,225,412
2011	3,565,887
2012	4,742,452
2013	5,763,277

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pada Tabel 1 tersebut dapat dilihat perkembangan pengeluaran di wilayah Sumatera Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perubahan pengeluaran bisa diartikan sebagai usaha pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan bisa berhubungan pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran. Pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah yang akan berdampak pada pembangunan daerah. Jika pengeluaran pemerintah semakin meningkat maka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut akan meningkat, serta akan menciptakan pembangunan didaerah tersebut. Apabila pembangunan disuatu daerah tersebut tinggi maka akan sulit ditemukan ketimpangan pendapatan daerah dan sebaliknya, apabila pembangunan disuatu daerah tersebut rendah dan terpusat pada satu daerah maka akan muncul ketimpangan pendapatan pada daerah tersebut.

Apabila dilihat dari data Indeks Wiliamson, tingkat ketimpangan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005 sampai 2014 terjadi ketimpangan yang cukup tinggi, hal ini dapatdilihat dari angka Indeks Wiliamson di Provinsi Sumatera Selatan diatas 0,5. Ketimpangan regional merupakan salah satu bagian kecil dari masalah ketimpangan yang sebenarnya lebih luas di setiap negara berkembang. Ketimpangan regional merupakan suatu aspek yang umum terjadi di setiap negara baik negara berkembang maupun negara maju. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda (Sjafrizal, 2008).

Tabel 2. Perkembangan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Indeks Wiliamson Provinsi Sumatera Selatan
2005	0.70
2006	0.69
2007	0.67
2008	0.64
2009	0.63
2010	0.62
2011	0.61
2012	0.60
2013	0.63
2014	0.61

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2017 (data diolah)

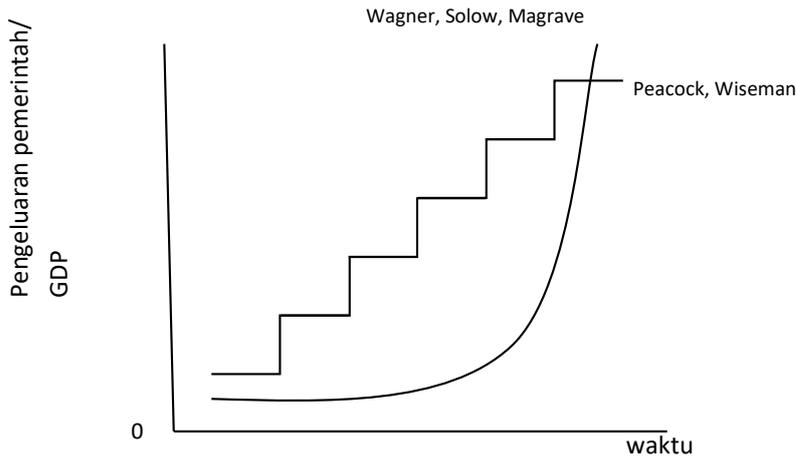
Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro dan Smith, 2004). Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi dan dari proses pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat ketimpangan diakibatkan tidak meratanya pertumbuhan di suatu daerah. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pengeluaran Pemerintah

Semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan pembiayaan dan ini didukung oleh penerimaan pemerintah baik yang berasal dari penerimaan rutin maupun penerimaan pembangunan. Demikian pula kegiatan pemerintah dibedakan menjadi kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. (Suparmoko, 2011). Teori pengeluaran pemerintah memiliki dua jenis teori yaitu teori mikro pengeluaran pemerintah dan teori makro pengeluaran pemerintah. Teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah ini mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersediannya barang publik. Pada teori makro pengeluaran pemerintah ada beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi seperti, model pembangunan tentang perkembangan pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 2001, 178).

Pada tahap menengah peranan investasi pemerintah masih dibutuhkan, namun investasi swasta semakin besar. Peran swasta yang semakin besar ini menyebabkan kegagalan pasar juga semakin besar yang pada akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak dan lebih baik. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke aktivitas-aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

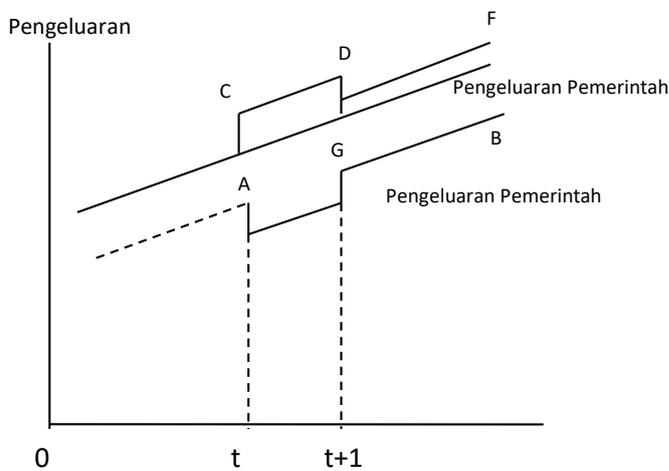


Gambar 1. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Sumber: Mangkoesobroto (2001)

Mangkoesobroto (2001) dalam bukunya menyebutkan bahwa Wagner mengemukakan sebuah teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan sebutan hukum Wagner, yaitu semakin besar terhadap GNP. Menurut Wagner, jika dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, dan sebagainya.

Peacock dan Wiseman (Dumairy, 1996) berpendapat bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.



Gambar 2. Teori Peacock dan Wiseman

Sumber: Mangkoesobroto (2001)

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Para ahli atau pemikir ekonomi memberikan definisi dan juga sekaligus menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi dengan berbagai contoh yang dipergunakan. Perkembangan teori ekonomi terus berlangsung dari mulai pandangan klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, kemudian Robert Solow dan mashab Neo Klasik sampai pada teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Harrod-Domar. Secara singkat akan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith adalah pelopor pembangunan ekonomi dan kebijakan *Laissez-Faire*, tetapi juga merupakan ekonom pertama yang banyak menumpahkan perhatian kepada masalah pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* (1776) ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis.

Menurut Smith (Jhingan, 2004; 84) proses pertumbuhan bersifat menggumpal (kumulatif). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan menarik kepemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya jumlah penduduk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan keuntungan secara terus-menerus (semua ini terjadi dalam apa yang disebut Smith "Situasi Progresif" yang dalam kenyataannya merupakan keadaan yang menyenangkan bagi seluruh lapisan masyarakat). Dalam keadaan yang maju seperti ini, sementara masyarakat meraih hasil-hasil yang lebih baik, keadaan buruh miskin menjadi kelompok yang paling bahagia dan nyaman. Tetapi proses ini ada akhirnya, kelangkaan sumber daya pada akhirnya memberhentikan pertumbuhan.

Menurut Sukirno (2006) apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus-menerus berlangsung secara kumulatif. Apabila pasar berkembang, pembagian kerja dan spesialisasi akan terjadi, dan yang belakangan ini akan menimbulkan kenaikan produktivitas dan pembangunan nasional. Kenaikan pendapatan nasional yang disebabkan oleh perkembangan penduduk yang terjadi secara bersama-sama akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang digunakan untuk kebutuhan investasi sementara spesialisasi dan pembagian kerja akan menciptakan inovasi penduduk dan inovasi proses. Proses yang berlangsung dari waktu tersebut menimbulkan perkembangan ekonomi dan meningkatkan pendapatan perkapita.

2.2.2. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR). Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh (Lincoln, 2004, 64-67).

2.3. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Konsep pengukuran distribusi pendapatan dapat ditunjukkan oleh dua konsep pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Ahluwalia dalam Sukirno, 2006).

2.4. Ketimpangan Pendapatan

Menurut Todaro (2008:83), ketimpangan pendapatan antar daerah tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima pendapatan dalam daerah tersebut, baik itu golongan masyarakat maupun wilayah tertentu dalam daerah tersebut. Perbedaan jumlah pendapatan yang diterima itu menimbulkan suatu distribusi pendapatan yang berbeda, sedangkan besar kecilnya perbedaan tersebut akan menentukan tingkat pemerataan pendapatan (ketimpangan pendapatan) daerah tersebut. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan tergantung dari besar kecilnya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh penerima pendapatan. Timbang atau tidaknya pendapatan daerah dapat diukur melalui distribusi penerimaan pendapatan antar golongan masyarakat ataupun antar wilayah. Koefisien Gini Produk Nasional Bruto perkapita menunjukkan pendapatan yang diterima wilayah tersebut terlihat pada nilai PDRB-nya, sedangkan untuk golongan masyarakat tentunya adalah jumlah yang diterimanya pula.

Ketimpangan pendapatan sebenarnya telah terjadi diseluruh negara di dunia, baik negara yang sudah maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Namun perbedaannya adalah ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunan, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah. Keadaan ini antara lain dijelaskan oleh Todaro, bahwa negara-negara maju secara keseluruhan memperlihatkan pembagian pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan negara-negara dunia ketiga yakni negara-negara yang tergolong sedang berkembang (Todaro, 2008, 83).

2.4.1. Analisis Koefisien Gini

Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi. Ukuran ini pertama kali dikembangkan oleh statistik dan ahli sosiologi Italia bernama Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam makalahnya berjudul *variability and mutability*. Koefisien Gini yaitu ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

Berikut ini adalah rumusan dari Koefisien Gini:

Secara umum:

$$G = \sum_{l=1}^k x_l \cdot y_{l-1} - \sum_{l=1}^k x_l \cdot y_l - 1$$

dimana: X_i adalah proporsi penerimaan pendapatan secara kumulatif; dan Y_i adalah proporsi pengeluaran secara kumulatif.

Penyesuaian model:

$$G = 1 - \sum (X_i + 1 - X_i) (Y_i + Y_i + 1)$$

$$G = 1 - \sum f_i (X_i + Y_i + 1)$$

dimana: G adalah Rasio Gini; F_i adalah Proporsi jumlah kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan; X_i adalah Proporsi jumlah komulatif kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan; dan Y_i adalah Proporsi jumlah komulatif pendapatan dalam Provinsi Sumatera Selatan

2.4.2. Rasio Kuznets

Simon Kuznets mengemukakan sebuah konsep mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di sebuah daerah berdasarkan tiga aspek, yaitu output nasional makin meningkat,

kemajuan teknologi tergantung dari penambahan pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan dan penyesuaian kelembagaan. Simon Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets “U-terbalik”, karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan.

Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern. Inti teori distribusi pendapatan Kuznet adalah dalam tahap awal pembangunan tingkat kesenjangan pendapatan suatu masyarakat relatif senjang lalu tingkat kesenjangan ini terus meningkat sampai pada titik tertentu dan kemudian tingkat kesenjangan tersebut menurun. Dalam hal ini terjadi apa yang disebut *trade off* artinya jika pada tahap awal pembangunan terjadi pertumbuhan yang tinggi maka tingkat distribusi pendapatan juga tinggi, kemudian dalam proses selanjutnya kesenjangan pendapatan relatif stabil dan kemudian menurun karena adanya ketentuan-ketentuan legislatif dan keputusan-keputusan politik terhadap kelompok pendapatan tinggi.

3. METODE

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas tentang hubungan pengeluaran pemerintah dan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data runtun waktu (*time series*) dalam bentuk tahunan dari tahun 1996–2015. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan uji Kaulitas Granger. Bentuk formulasi penyesuaian model regresi disini adalah sebagai berikut:

$$G_t = \sum_{j=1}^m a_j \cdot G_{t-j} + \sum_{j=1}^n b_j \cdot Y_{t-j} + U_t$$

$$Y_t = \sum_{j=1}^r c_j \cdot Y_{t-j} + \sum_{j=1}^s d_j \cdot G_{t-j} + V_t$$

dimana: G adalah pengeluaran pemerintah; Y adalah ketimpangan pendapatan; U_t dan V_t adalah error term; t adalah tahun; t-i= t-j adalah operasi kelambanan waktu (lag)

Berdasarkan hasil regresi dari kedua bentuk model regresi linear di atas akan menghasilkan empat kemungkinan mengenai koefisien-koefisien regresi dari persamaan berikut:

- **$b_j = d_j = 0$** → tidak ada pengaruh antara pengeluaran pemerintah dan ketimpangan pendapatan tidak saling mempengaruhi.
- **$b_j = 0$ & $d_j \neq 0$** → terdapat pengaruh satu arah yaitu pengeluaran pemerintah mempengaruhi ketimpangan pendapatan.
- **$b_j \neq 0$ & $d_j = 0$** → terjadi pengaruh satu arah yaitu ketimpangan pendapatan mempengaruhi pengeluaran pemerintah.
- **$b_j \neq 0$ & $d_j \neq 0$** → ada pengaruh dua arah pengeluaran pemerintah dan ketimpangan pendapatan saling mempengaruhi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hubungan Kausalitas antara Pengeluaran dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Menurut hasil Uji Kausalitas Granger terdapat hubungan satu arah antara pengeluaran pemerintah dan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu pengeluaran pemerintah mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa nilai probabilitas pengeluaran pemerintah mempengaruhi ketimpangan distribusi

pendapatan $\alpha = 0,1$ yaitu sebesar 0,07. Dan sebaliknya pada variabel ketimpangan distribusi pendapatan tidak mempengaruhi pengeluaran pemerintah dibuktikan bahwa nilai probabilitasnya lebih besar dari $\alpha = 0,1$ yaitu sebesar 0,18. Dengan demikian artinya terdapat hubungan satu arah antara variabel pengeluaran pemerintah dan Ketimpangan distribusi pendapatan, kedua variabel tersebut memiliki hubungan satu arah.

Tabel 3. Hasil Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PENGELUARAN does not Granger Cause GINI	19	3.65185	0.0741
GINI does not Granger Cause PENGELUARAN		1.9062	0.1864

Sumber: Hasil olah data oleh penulis

Dari hasil estimasi regresi di atas menunjukkan hubungan positif bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Maka dari hasil tersebut menghasilkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Gini} &= 0.276333 + 0.000000000000002 * \text{PP} \\ t\text{-test} &= (48.97843) \quad (9.815724) \\ R^2 &= 0.842586 \end{aligned}$$

R^2 atau adjusted R^2 dari hasil regresi yang dilakukan, nilai dari koefisien determinasi ini sendiri terletak antara 0 – 1. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,842586 yang menunjukkan pengaruh dari variabel independen pengeluaran pemerintah memiliki porsi sebesar 84,25% terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan sebesar 16,75% tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi oleh faktor lain diluar pengeluaran pemerintah.

Tabel 4. Hasil Regresi Sederhana

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.276333	0.005642	48.97843	0.0000
PENGELUARAN	2.00E-14	2.04E-15	9.815724	0.0000
R-squared	0.842586	Mean dependent var		0.317100
Adjusted R-squared	0.833841	S.D. dependent var		0.041896
S.E. of regression	0.017078	Akaike info criterion		-5.207437
Sum squared resid	0.005250	Schwarz criterion		-5.107864
Log likelihood	54.07437	Hannan-Quinn criter.		-5.187999
F-statistic	96.34843	Durbin-Watson stat		1.512132
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olah data oleh penulis

Terdapat ketidaksesuaian dengan Hipotesis Keynes yang menyatakan semakin tingginya pengeluaran pemerintah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka, berdampak pada menurunnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah. Hasil tersebut membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah masih tidak merata dan masih terpusat pada daerah maju, dilihat dari segi fasilitas publik seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas jalan, fasilitas air bersih.

Perbedaan fasilitas publik yang tersedia antara daerah maju dan tertinggal akan mengakibatkan perpindahan penduduk, tentunya masyarakat akan mencari tempat tinggal yang memiliki fasilitas publik yang lebih lengkap, selain itu dengan padatnya jumlah penduduk di daerah

yang maju dan permintaan akan fasilitas publik tinggi dan jumlah dari penyediaan fasilitas publik oleh pemerintah yang tidak memadai maka kekurangan fasilitas publik tersebut akan menjadi kesempatan dari sektor swasta untuk menyediakannya tentu dengan pertimbangan ekonomi yang menguntungkan. Dengan kondisi demikian maka daerah maju akan semakin lengkap fasilitas publik, dan daerah yang tertinggal akan semakin berkurang penduduknya sehingga pemanfaatan fasilitas publik di daerah tersebut menjadi berkurang.

4.2. Kointegrasi antara Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai *trace statistic* dan *maximum eigenvalue* pada $r = 0$ lebih kecil dari *critical value* dengan tingkat signifikansi atau derajat kepercayaan 5%. Hal ini berarti hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada kointegrasi diterima dan hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada kointegrasi ditolak. Berdasarkan analisis ekonometrik di atas dapat dilihat bahwa kedua variabel dalam penelitian ini tidak ada kointegrasi pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, dari hasil uji kointegrasi mengindikasikan bahwa di antara pengeluaran pemerintah dan ketimpangan distribusi pendapatan tidak memiliki hubungan jangka panjang.

Tabel 5. Hasil Uji Kointegrasi Johansen

Hypothesis Null	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value
None	0.349452	7.785732	15.49471	7.738914	14.2646
At most 1	0.002598	0.046818	3.841466	0.046818	3.841466

Sumber: Hasil olah data oleh penulis

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Jiranyakul (2007) bahwa tidak terdapat hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi tetapi, dilihat dari hubungan Kausalitas Granger terdapat hubungan satu arah yaitu pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hal ini didukung dengan hipotesis Keynes yang menyebutkan adanya pengaruh pengeluaran pemerintah yang menyebabkan naiknya pendapatan suatu daerah.

5. KESIMPULAN

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan adalah satu arah dan bukan sebaliknya. Sementara dalam jangka panjang tidak ada kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan.

REFERENSI

- Jhingan M.L., (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Jiranyakul, K., (2013). The Relation between Government Expenditures and Economic Growth in Thailand. *Journal of Economics and Economic Education Research*, 8(1): 93-102.
- Lincoln, A. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit STIE Ilmu Ekonomi YKPN.
- Mangkosoebroto, Guritno. (2001). *Ekonomi Publik Edisi ketiga*, Yogyakarta: BPFE UGM
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua*. Kencana Prenada Media Group: Indonesia.
- Suminto. (2004). *Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara*. Jakarta: Ditjen Anggaran, DEPKEU.

Suparmoko, M. (2011). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.

Todaro, Michael, P. (2008). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan. Jilid 1*, Jakarta: Penerbit Erlangga